

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jawa Timur merupakan salah satu Provinsi yang ada di Indonesia yang terletak di sebelah Timur Pulau Jawa dengan jumlah dan kepadatan penduduk yang tinggi dan menjadi salah satu Provinsi yang menjadi pusat perekonomian baik di Pulau Jawa maupun Nasional. Dengan jumlah penduduk >39 (juta) pada tahun 2018 hingga pada akhir tahun 2022 mencapai >41 (juta) juta penduduk dengan didominasi usia produktif.² Dengan jumlah penduduk terbanyak kedua di Indonesia, Provinsi Jawa Timur justru dihadapkan dengan tantangan perekonomian yang tak kunjung usai. Salah satu permasalahan pokok yang sering dialami yaitu masalah ketenagakerjaan dalam bentuk pengangguran.³

Pengangguran merupakan indikator ekonomi yang selalu saja menjadi topik pembahasan yang tidak kunjung usai, asumsi ketidakefektifan karena tidak terserapnya tenaga kerja menjadi sebuah ironi ditengah persaingan ekonomi yang ketat, pemanfaatan dari sumber daya manusia (SDM) dinilai kurang tepat karena masih menyisakan ruang bagi para tunakarya untuk dapat meletakkan kehidupannya pada sebuah payung

² Badan Pusat Statistik, dalam <https://jatim.bps.go.id/>, diakses 7 September 2024

³ Dian Priastiwi dan Herniwati retno Wulandari, "Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan Jumlah Minimum, dan PDRB terhadap tingkat pengangguran terbuka di Jawa Tengah", *Jurnal Ekonomi* 1, no.1, (2019): 160.

kenegaraan. Negara manapun di dunia ini baik yang dikategorikan negara maju maupun negara sedang berkembang selalu mengalami atau pasti menghadapi masalah yang namanya pengangguran yang umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang mampu menyerapnya.⁴

Pengangguran adalah seseorang yang tergolong angkatan kerja atau sedang mencari pekerjaan tetapi belum memperolehnya.⁵ Pengangguran merupakan masalah kompleks yang dialami sebagian besar negara di dunia, baik negara maju maupun negara berkembang. Dalam hal ini, negara berkembang tidak mampu menghadapi masalah tersebut dengan memberikan tunjangan kepada warga yang menganggur, sedangkan negara maju mampu memberikan tunjangan tersebut. Oleh karena itu, pengangguran dapat menyebabkan masalah sosial di masyarakat karena seseorang yang tidak bekerja mereka tidak memperoleh penghasilan.⁶

Di Jawa Timur, sebagai provinsi dengan populasi terbesar kedua di Indonesia persoalan pengangguran menjadi isu yang cukup serius dan berdampak luas pada kesejahteraan masyarakat. Selama periode 2019 hingga 2023, kondisi ekonomi nasional dan regional mengalami berbagai dinamika yang signifikan, termasuk di antaranya dampak pandemi covid-

⁴ Bobby Cahyadi Kurniawan, "Analisis Pengaruh PDRB, UMK, dan Inflasi Terhadap pengangguran terbuka di Malang tahun 1980-2011", *jurnal ilmiah*, (Malang: 2013): 4.

⁵ Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori...*, 78.

⁶ Kasanah, dkk, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah", *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, Vol. (1), 21-25.

19 yang melanda pada awal tahun 2020. Pandemi ini mempengaruhi hampir semua sektor ekonomi, menyebabkan banyak perusahaan harus mengurangi kegiatan operasional atau bahkan menghentikan operasionalnya secara permanen, yang pada gilirannya meningkatkan angka pengangguran.

Provinsi Jawa Timur dengan jumlah penduduknya yang banyak dan masih menjadi provinsi dengan tingkat pengangguran yang cukup tinggi. Berikut tabel pengangguran provinsi di Pulau Jawa periode tahun 2019 – 2023.

Tabel 1. 1

Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2019 – 2023

Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi di Pulau Jawa					
Nama Wilayah	2019	2020	2021	2022	2023
DKI Jakarta	6,72	11,79	9,84	8,04	7,05
Jawa Barat	8,04	10,46	9,82	8,31	7,44
Jawa Tengah	4,44	6,48	5,95	5,57	5,13
DI Yogyakarta	3,14	4,57	4,56	4,06	3,69
Jawa Timur	3,82	5,84	5,74	5,49	4,88
Banten	8,11	10,64	8,98	8,09	7,52

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

Indikator pengangguran dapat diketahui dari jumlah pengangguran dan presentase tingkat pengangguran. Berdasarkan tabel diatas, Provinsi Jawa Timur menduduki posisi kelima dengan tingkat pengangguran tertinggi di pulau Jawa dan menduduki peringkat ke-18 jika dibandingkan dengan seluruh provinsi di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang rilis 6 November 2023, TPT Jawa Timur pada Agustus

2023 berada di angka 4,88 persen atau 1,17 juta jiwa.⁷ Meskipun Provinsi Banten memiliki tingkat pengangguran yang lebih tinggi dibandingkan Jawa Timur, pemilihan Jawa Timur sebagai fokus penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan yang lebih komprehensif dan strategis. Jawa Timur merupakan provinsi dengan populasi terbesar kedua di Indonesia dan memiliki struktur ekonomi yang lebih beragam, mulai dari sektor industri manufaktur, pertanian, hingga jasa. Keberagaman ini mencerminkan kompleksitas pasar tenaga kerja yang lebih representative. Tingkat pengangguran di Jawa Timur yang berada pada posisi kelima tertinggi di Pulau Jawa masih menunjukkan angka yang cukup signifikan sehingga tetap menjadi masalah penting yang perlu ditangani. Selain itu, Jawa Timur memiliki disparitas sosial-ekonomi yang cukup lebar antar wilayah. Jawa Timur sebagai salah satu provinsi dengan peran strategis dalam perekonomian nasional dan karakteristik sosial budaya yang khas menjadikannya wilayah yang penting untuk dikaji dalam perspektif ekonomi Islam, khususnya dalam upaya pemberdayaan sumber daya manusia dan pengentasan pengangguran secara berkelanjutan. Itu artinya permasalahan pengangguran masih menjadi permasalahan serius yang terus dihadapi oleh Provinsi Jawa Timur.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pengangguran terdiri dari mereka yang menganggur dan sedang mencari pekerjaan, mereka yang

⁷ “Berada di Angka 4,88 Persen, Tingkat Pengangguran Terbuka Jatim Turun Signifikan “ Selengkapnya di <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/berada-di-angka-4-88-persen-tingkat-pengangguran-terbuka-jatim-turun-signifikan>, diakses pada 7 September 2024

menganggur dan mempersiapkan usaha, mereka yang menganggur dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.⁸ Salah satu faktor yang menyebabkan tingginya tingkat pengangguran disebabkan oleh tingginya pertumbuhan jumlah penduduk. Pada dasarnya, peningkatan jumlah penduduk memiliki dua sisi yang berbeda. Jumlah penduduk yang besar merupakan modal dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional, tetapi di sisi lain dengan pengaturan yang tidak tepat, jumlah penduduk yang besar dapat menimbulkan permasalahan penduduk yang sangat krusial terutama di bidang ketenagakerjaan. Tingginya pertumbuhan penduduk apabila tidak disertai dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas maka mereka tidak mampu menempati lapangan pekerjaan yang tersedia di wilayah tersebut.⁹

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu angka yang mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup yang dapat mempengaruhi tingkat produktivitas yang dihasilkan oleh seseorang. Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia (2016), menjelaskan bahwa indeks pembangunan manusia dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.¹⁰ IPM menjadi

⁸ Badan Pusat Statistik, dalam <https://jatim.bps.go.id/>, diakses 7 September 2024

⁹Wahyuni. & Daru. "Peran Sektor Informal Dalam Menanggulangi Masalah Pengangguran di Indonesia". *Jurnal Economia* 1, no. 1. 2005.

¹⁰ Dwi Mahroji dan Iin Nurkhasanah, "Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran Di Provinsi Banten," *Jurnal Ekonomi-Qu* 9, no. 1 (30 April 2019): 56.

acuan bagi pembangunan suatu daerah, suatu daerah memiliki nilai IPM yang tinggi, otomatis kualitas kehidupan penduduk di daerah tersebut tinggi.¹¹

Di sisi lain, negara dengan IPM yang tinggi cenderung memiliki tingkat pengangguran yang lebih rendah karena adanya akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi. Tingkat IPM yang tinggi biasanya berdampak positif pada penurunan tingkat kemiskinan, yang pada gilirannya dapat mengurangi tingkat pengangguran. Sebaliknya, ketika tingkat kemiskinan meningkat, biasanya akan diikuti dengan peningkatan tingkat pengangguran. Dengan demikian, upaya untuk meningkatkan IPM dan mengurangi tingkat kemiskinan dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran dalam suatu negara. Kebijakan yang mendukung pendidikan yang berkualitas, akses kesehatan yang baik, pelatihan kerja, dan program pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah dapat membantu mengatasi masalah pengangguran.¹²

Penelitian mengenai hubungan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan tingkat pengangguran telah menghasilkan temuan yang beragam. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Dwi Mahroji dan

¹¹ Amrizal, "Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Dan upah Minimum Provinsi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Jambi," *Jurnal Khazanah Intelektual* 6, no. 3 (26 Desember 2022): 1521.

¹² Gadis Puan Mahesa, Nabila Khairunnisa, dan Misfi Laili Rohmi, "Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (Tpt) Di Provinsi Dki Jakarta Tahun 2011-2020," *Kajian Ekonomi dan Akuntansi Terapan* 1, no. 4 (15 Mei 2024): 4.

Iin Nur Khasanah¹³ mengenai hubungan indeks pembangunan manusia dan tingkat pengangguran menyimpulkan bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Banten. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) maka semakin kecil tingkat pengangguran. Namun demikian, hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dwi Wilujeng dan Ferry Prasetya¹⁴ menunjukkan hasil bahwa variabel IPM tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Pulau Jawa pada tahun 2017-2021. Artinya perubahan atau peningkatan IPM tiap kabupaten/kota di Pulau Jawa selama lima tahun periode tidak secara langsung berdampak pada penurunan tingkat pengangguran. Perbedaan hasil ini menunjukkan bahwa hubungan antara IPM dan pengangguran dapat bervariasi tergantung pada konteks wilayah dan periode waktu yang diteliti.

Berikut tabel laju Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi di pulau Jawa yang sumber datanya diperoleh melalui Badan Pusat Statistik Jawa Timur sebagai berikut:

Tabel 1. 2
Laju Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi di Pulau Jawa
Tahun 2019 – 2023

Presentase Indeks Pembangunan Manusia Provinsi di Pulau Jawa					
Nama Wilayah	2019	2020	2021	2022	2023
DKI Jakarta	80,76	80,77	81,11	81,65	82,46
Jawa Barat	72,03	72,09	72,45	73,12	73,74

¹³ Dwi Mahroji dan Iin Nurkhasanah, “Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran Di Provinsi Banten,” *Jurnal Ekonomi-Qu* 9, no. 1 (30 April 2019).

¹⁴ Dwi Wilujeng dan Ferry Prasetya, “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Tingkat Pengangguran”, *Journal Of Development Economic and Social Studies* 3, no. 2, (2024)

Presentase Indeks Pembangunan Manusia Provinsi di Pulau Jawa					
Nama Wilayah	2019	2020	2021	2022	2023
Jawa Tengah	71,73	71,87	72,16	72,79	73,39
DI Yogyakarta	79,99	79,97	80,22	80,64	81,08
Jawa Timur	71,50	71,71	72,14	72,75	73,38
Banten	72,44	72,45	72,72	73,32	73,87

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Timur mungkin terendah jika dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa menurut data BPS yang disajikan pada tabel 1.2 diatas. Akan tetapi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya di Provinsi Jawa Timur terus mengalami kenaikan secara tipis setiap tahunnya. Per 1 Desember 2023, IPM Jawa Timur tercatat 74,65, meningkat 3,15 persen selama periode 2019 - 2023. Adapun capaian IPM tahun 2023 pada Provinsi Jawa Timur ini tercatat 74,39.¹⁵ Dengan melihat adanya pertumbuhan indeks pembangunan manusia tersebut dapat diartikan bahwa pemulihan ekonomi sosial membawa pengaruh terhadap pembangunan manusia di Provinsi Jawa Timur.

Selain Indeks Pembangunan Manusia, ketimpangan distribusi pendapatan juga dapat mempengaruhi tingkat pengangguran yang ada. Ketimpangan pendapatan merupakan suatu kondisi dimana distribusi pendapatan yang diterima masyarakat tidak merata. Ketimpangan distribusi pendapatan merupakan masalah perbedaan pendapatan antara individu yang paling kaya dengan individu yang paling miskin. Semakin besar jurang

¹⁵ "IPM Jatim 2023 Naik, Khofifah Optimistis Jatim Bisa Wujudkan RI Emas 2045" selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-7072576/ipm-jatim-2023-naik-khofifah-optimistis-jatim-bisa-wujudkan-ri-emas-2045>. diakses pada 7 September 2024

pendapatan maka semakin besar pula variasi dalam distribusi pendapatan. Maka disini peran pemerintah diperlukan dalam menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dengan distribusi pendapatan, sehingga ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, maka kesejahteraan masyarakat akan distribusi pendapatannya pun juga dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.¹⁶

Penelitian mengenai pengaruh ketimpangan distribusi pendapatan terhadap tingkat pengangguran juga menunjukkan hasil yang beragam. Kasypul Anwar¹⁷ dalam penelitiannya di Provinsi Kalimantan Selatan menemukan bahwa gini rasio, yang mencerminkan tingkat ketimpangan pendapatan, secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi ketimpangan pendapatan, maka tingkat pengangguran juga cenderung meningkat. Namun, hasil berbeda ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Sri Mahendra Satria Wirawan¹⁸ di Provinsi DKI Jakarta, yang menunjukkan bahwa gini rasio tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Perbedaan hasil penelitian ini memperkuat dugaan bahwa pengaruh ketimpangan pendapatan terhadap pengangguran tidak bersifat seragam di setiap wilayah,

¹⁶ Dwi Mahroji dan Iin Nurkhasanah, "Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran Di Provinsi Banten," *Jurnal Ekonomi-Qu* 9, no. 1 (30 April 2019): 11.

¹⁷ Kasypul Anwar, "Analisis Pengaruh Pendidikan dan Gini Rasio terhadap Tingkat Pengangguran di Kalimantan Selatan," *Jurnal Humaniora dan Ilmu Pendidikan* 3, no. 1 (4 Juli 2023).

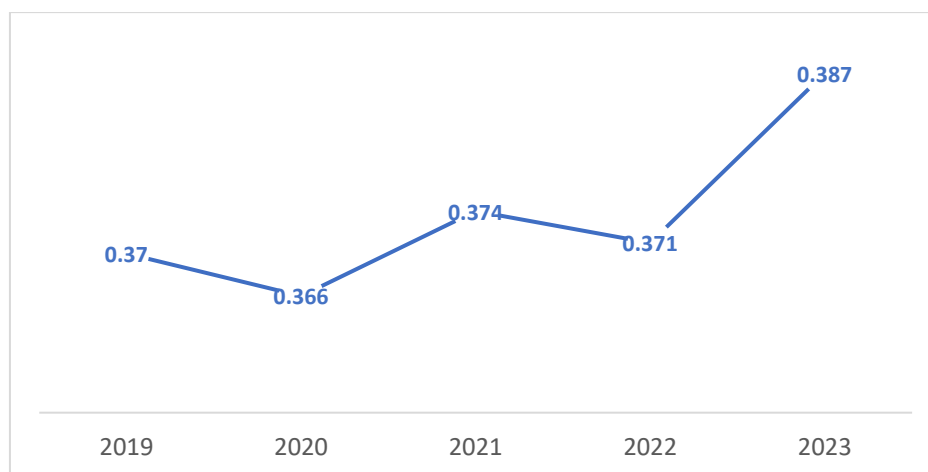
¹⁸ Sri Mahendra Satria Wirawan, "Pengaruh Produk Domestik Bruto, Inflasi dan Rasio Gini Terhadap Pengangguran Terbuka di Provinsi DKI Jakarta", *Jurnal Good Governance* 14, no. 2, (2018)

melainkan sangat bergantung pada kondisi sosial ekonomi dan karakteristik regional masing-masing daerah.

Berikut ini disajikan data gini rasio Provinsi Jawa Timur tahun 2019 – 2023.

Gambar 1. 1

Gini Rasio Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2023



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

Pada grafik diatas dijelaskan bahwa gini rasio di Provinsi Jawa Timur mengalami fluktuasi. Gini rasio di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019 tercatat sebesar 0,370 dan mengalami sedikit penurunan sebesar 0,366 di tahun 2020. Namun pada periode tahun 2021 nilai gini rasio mengalami kenaikan menjadi 0,374 dan kembali mengalami penurunan sebesar 0,371 di tahun 2022. Nilai gini rasio kembali mengalami peningkatan hingga mencapai nilai tertinggi sebesar 0,387 di tahun 2023.¹⁹

Selanjutnya faktor lain yang mempengaruhi tingkat pengangguran adalah tingkat pendidikan, adapun hubungan antara tingkat pendidikan dan tingkat pengangguran adalah tingkat pendidikan dapat menentukan status

¹⁹ Badan Pusat Statistik, dalam <https://jatim.bps.go.id/>, diakses 7 September 2024

pekerjaan seseorang, karena dengan baiknya tingkat pendidikan seseorang maka akan cenderung mendapatkan pekerjaan yang lebih berkualitas sehingga pendapatannya dapat memenuhi kebutuhan hidup dan juga dapat mengurangi pengangguran. Selain itu dengan berpendidikan tinggi, keadaan pengangguran tidak akan separah jika dibandingkan dengan yang berpendidikan rendah, dan dengan berpendidikan tinggi mampu memperoleh upah yang berkisar pada batas minimum.²⁰

Kukuh Dwi Mahardika dan Nurul Badriyah menganalisis adanya modal manusia dalam bentuk tingkat pendidikan lebih tinggi dapat menghasilkan tenaga kerja berkualitas yang kemudian dapat meningkatkan daya guna ataupun efisiensi dalam proses produksi dan meningkatkan kesempatan untuk tenaga kerja berkualitas dalam rangka mengisi kesempatan kerja di Jawa Timur. Dalam penelitiannya diketahui bahwa pendidikan mempengaruhi tingkat pengangguran karena berperan penting dalam membentuk kualifikasi keterampilan, pengetahuan dan kemampuan seseorang untuk bersaing di pasar kerja. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi dapat membantu seseorang untuk mendapatkan keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan tertentu, sehingga meningkatkan peluang mereka untuk memperoleh pekerjaan dan mengurangi tingkat pengangguran.²¹

²⁰ “Pengaruh Pertumbuhan Penduduk, Kemiskinan, Tingkat Pendidikan dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Propinsi Banten,” *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 31 Juli 2024, 67, <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v24i1.17970>.

²¹ Kukuh Dwi Mahardika dan Nurul Badriyah, “Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah Dan Upah Minimum Regional Terhadap Tingkat Pengangguran Di Jawa Barat Tahun 2017-2021,” *Journal of Development Economic and Social Studies* 3, no. 1 (20 Februari 2024): 283.

Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur mencatat tingkat pendidikan di wilayah tersebut masih menjadi perhatian serius. Pada tahun 2023, ditemukan bahwa proporsi terbesar warga usia 10 tahun ke atas hanya menamatkan pendidikan hingga tingkat Sekolah Dasar (SD) ke bawah, mencapai 46,22 persen. Situasi ini masih menjadi indikator rendahnya tingkat Pendidikan di Provinsi Jawa Timur.²²

Tabel 1. 3

Data Pendidikan Berdasarkan Angka Melek Huruf Provinsi di Pulau Jawa
Tahun 2019 – 2023

Angka Melek Huruf Provinsi di Pulau Jawa (%)					
Nama Wilayah	2019	2020	2021	2022	2023
DKI Jakarta	99,74	99,69	99,73	99,69	99,69
Jawa Barat	98,53	98,63	98,62	98,49	98,51
Jawa Tengah	93,54	93,62	93,79	94,26	94,34
DI Yogyakarta	94,96	95,09	95,22	95,15	95,59
Jawa Timur	92,32	92,56	92,11	93,32	93,70
Banten	97,62	97,88	97,78	98,16	98,32

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

Dari tabel 1.3 diketahui bahwa presentase Angka Melek Huruf di Provinsi Jawa Timur merupakan paling rendah daripada provinsi lainnya di pulau Jawa. Akan tetapi, Provinsi Jawa Timur setiap tahunnya mengalami kenaikan secara tipis mulai dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Dengan semakin meningkatnya angka melek huruf di suatu daerah atau wilayah tersebut pastinya masyarakat dalam daerah tersebut menyadari akan pentingnya suatu pendidikan sehingga dapat meningkatkan kualitas dan mutu sumber daya manusia. Tingkat pendidikan mempengaruhi

²² Badan Pusat Statistik, dalam <https://jatim.bps.go.id/>, diakses 7 September 2024

pengangguran dan juga pertumbuhan ekonomi, dengan begitu pemerintah harus menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama dalam menyusun sebuah kebijakan.²³

Pengangguran menjadi salah satu tolak ukur dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Islam sangat melarang umatnya untuk menganggur. Tujuan pengetasan Pengangguran dalam ekonomi konvensional dan ekonomi Islam cenderung sama yaitu keduanya sama-sama berusaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun ternyata ekonomi Islam memiliki tujuan yang lain. Selain untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tapi juga untuk menjalankan perintah Allah SWT yaitu memiliki pekerjaan yang layak agar terhindar dari perbuatan yang merugikan. Disini terlihat bahwa tujuan pengetasan pengangguran dalam islam melihat dari dimensi vertikal (*Habluminallah*) dan horizontal (*Habluminannas*) yaitu berusaha untuk mencari ridho Allah, dan berusaha untuk tujuan duniawi. Islam telah memperingatkan agar umatnya jangan sampai ada yang menganggur agar tidak terjerumus kemiskinan, karena ditakutkan kemiskinan dapat membawa manusia berbuat apa saja termasuk yang merugikan.²⁴

Dalam konteks syariah adanya masalah pengangguran juga merupakan suatu keburukan yang harus di atasi, Allah SWT telah

²³ George dkk, "Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran di Kabupaten Minahasa Utara", *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 24, no. 4. (2024): 284

²⁴ Maisyaroh, T. "Inflasi dan Pengangguran Dalam Islam", *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*. Vol. 7. No. 1. (2023): 2.

memerintah manusia untuk senantiasa berusaha dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup di dunia agar mampu untuk menjalankan ibadah seperti yang diperintahkan oleh Allah SWT seperti yang ada pada surat At-Taubah ayat 105 yang berbunyi :

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ۖ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلٰى عَلَمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: *Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”*

Ayat tersebut berisikan perintah Allah SWT kepada hamba-Nya agar senantiasa bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pekerjaan yang bertujuan untuk mencukupi kebutuhan keluarga serta mendekatkan diri kepada Allah SWT dapat bernilai ibadah.²⁵

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah mengenai tingkat pengangguran, indeks pembangunan manusia, ketimpangan distribusi pendapatan dan pendidikan. Yang mana apabila indeks pembangunan manusia mengalami kenaikan, maka akan terjadi penurunan pada jumlah pengangguran yang ada. Selain itu pada halnya ketimpangan distribusi pendapatan, apabila ketimpangan

²⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Robbani” Al-Qur’an Per Kata dan Terjemahannya*, (Jakarta Timur: PT Surya Prisma Sinergi, 2012), 204.

pendapatan mengalami penurunan akan berpengaruh terhadap naik turunnya presentase pengangguran yang ada. Mengenai tingkat pendidikan diharapkan mampu menjadi salah satu cara meminimalisasi pengangguran yang terjadi di Provinsi Jawa Timur. Oleh karena hal tersebut, peneliti bermaksud ingin mengkaji secara mendalam dengan konsep dan teori yang relevan agar mengetahui apakah antar variabel saling mempengaruhi atau tidak dan maka perlu kiranya menyusun strategi percepatan penurunan tingkat pengangguran di Jawa Timur utamanya pada periode tahun 2019-2023 dengan terlebih dahulu mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran di Jawa Timur dengan mempertimbangkan aspek yang berkaitan.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Penelitian

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

- a. Tingkat pengangguran di Jawa Timur menempati posisi kelima pada presentase angka pengangguran Provinsi di pulau Jawa, dan dilihat dari lima tahun terakhir mengalami penurunan secara signifikan hanya pada tahun 2023. Hal ini terjadi di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.
- b. Laju Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur dalam lima tahun terakhir mengalami kenaikan secara

tipis di setiap tahunnya. Namun IPM Jawa Timur masih menempati posisi terendah di Provinsi di pulau Jawa.

- c. Gini rasio di Provinsi Jawa timur mengalami fluktuasi di setiap tahunnya. Hingga pada tahun 2023 gini rasio Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan dan mencapai nilai tertinggi sebesar 0,387.
- d. Pendidikan di Jawa Timur dilihat dari angka melek huruf merupakan paling rendah jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di Pulau Jawa, akan tetapi setiap tahunnya juga mengalami peningkatan secara tipis. Sedangkan pada Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Timur mengalami fluktuasi setiap tahunnya.

2. Batasan Penelitian

Agar penelitian ini tidak meluas dan tetap sesuai dengan judul skripsi diatas, maka penulis membatasi masalah penelitian, yaitu:

- a. Peneliti hanya berfokus pada pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), ketimpangan distribusi pendapatan dan tingkat pendidikan terhadap tingkat pengangguran yang diambil dari kabupaten/kota wilayah Provinsi Jawa Timur tahun 2019 – 2023.
- b. Lokasi penelitian pada kabupaten/kota wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2023.
- c. Keterbatasan waktu penelitian, keterbatasan waktu dan fikiran peneliti sehingga dalam penelitian ini hanya menggunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS)

kabupaten/kotawilayah Provinsi Jawa Timur tahun 2019 – 2023.

C. Rumusan Masalah

Bersasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan bahwa permasalahan yang dikaji pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh IPM, ketimpangan distribusi pendapatan dan tingkat pendidikan yang secara bersama-sama terhadap tingkat pengangguran di Jawa Timur tahun 2019 – 2023?
2. Bagaimana pengaruh IPM terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Timur tahun 2019 – 2023?
3. Bagaimana pengaruh ketimpangan distribusi pendapatan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Timur tahun 2019 – 2023?
4. Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Timur tahun 2019 – 2023?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pengaruh signifikan IPM, ketimpangan distribusi pendapatan dan tingkat pendidikan yang secara bersama-sama terhadap tingkat pengangguran dalam Perspektif ekonomi Islam di Jawa Timur tahun 2019 – 2023

2. Untuk menguji pengaruh signifikan IPM terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Timur tahun 2019 – 2023
3. Untuk menguji pengaruh signifikan ketimpangan distribusi pendapatan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Timur tahun 2019 – 2023
4. Untuk menguji pengaruh signifikan tingkat pendidikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Timur tahun 2019 – 2023

E. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi pihak yang terkait atau membutuhkan informasi dan data yang terkait dengan penelitian ini.

1. Manfaat secara teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan literasi kepada mahasiswa program studi Ekonomi Syariah UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dan informasi yang berhubungan dengan pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), ketimpangan distribusi pendapatan dan tingkat pendidikan terhadap tingkat pengangguran dalam Perspektif ekonomi Islam di Jawa Timur tahun 2019 – 2023.

2. Manfaaat secara praktis

a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pemerintah selaku pemangku kebijakan dan yang bertanggungjawab dalam pengelolaan permasalahan yang ada di masyarakat terutama dalam bidang perekonomian. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pemecahan permasalahan yang sedang dihadapi di ruang lingkup wilayah yang diteliti.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi untuk melakukan penelitian selanjutnya agar mampu menganalisis khususnya yang terkait dengan pengaruh dengan pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), ketimpangan distribusi pendapatan dan tingkat pendidikan terhadap tingkat pengangguran dalam Perspektif ekonomi Islam di Jawa Timur tahun 2019 – 2023.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini hanya terbatas pada beberapa variabel diantaranya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), ketimpangan distribusi pendapatan, pendidikan dan juga tingkat pengangguran. Variabel – variabel tersebut dipilih untuk penelitian yang dilakukan di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur dengan rentang waktu tahun 2019 – 2023. Hal tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana ketiga variabel independen tersebut memengaruhi tingkat pengangguran dalam konteks pembangunan daerah.

Dengan membatasi wilayah dan waktu penelitian, diharapkan hasil analisis dapat menggambarkan hubungan kausal secara lebih akurat dan relevan terhadap kondisi sosial ekonomi di Jawa Timur. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori ekonomi Islam, khususnya dalam meninjau masalah ketimpangan dan pengangguran dari sudut pandang keadilan distribusi, pemerataan kesejahteraan, dan tanggung jawab sosial ekonomi.

G. Penegasan Variabel

1. Penegasan Konseptual

- a. Pengangguran adalah seseorang yang termasuk angkatan kerja, yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkan.²⁶
- b. Indeks pembangunan manusia adalah ukuran capaian pembangunan yang didasarkan pada faktor-faktor kunci kualitas hidup. Sumber daya manusia adalah sumber daya yang diperlukan untuk mewujudkan peranannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola seluruh potensi yang ada di dalamnya.²⁷

²⁶ Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori...*, 78.

²⁷ Darwin Lie et al., "Indeks Pembangunan Manusia Dengan Pertumbuhan Ekonomi" (Sumatera Barat: CV. Azka Pustaka, 2022).

- c. Ketimpangan pendapatan adalah suatu konsep yang menjelaskan perbedaan kemakmuran, standar hidup, serta pendapatan yang diterima atau dihasilkan oleh individu atau rumah tangga dalam masyarakat sehingga mengakibatkan tidak meratanya distribusi antar wilayah disebabkan oleh perbedaan faktor produksi dan sumber daya yang tersedia.²⁸
- d. Pendidikan merupakan suatu proses pembelajaran pengetahuan, keterampilan dan kebiasaan untuk mengembangkan bakat atau kemampuan peserta didik serta mengembangkan kepribadian baik di dalam maupun diluar sekolahan.²⁹
- e. Ekonomi Islam merupakan penerapan syariat Islam dalam aktivitas ekonomi. Pengertian ini sangat tepat untuk dipakai dalam menganalisis persoalan-persoalan aktivitas ekonomi di tengah masyarakat. Mislanya perilaku konsumsi masyarakat dinaungi oleh ajaran Islam, kebijaksanaan fiskal dan moneter yang dikaitkan dengan zakat, sistem kredit dan investasi yang dihubungkan dengan pelarangan riba.³⁰

2. Penegasan Operasional

- a. Pengangguran adalah kondisi di mana individu yang tergolong dalam angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari

²⁸ Riadi Muchlisin, —Ketimpangan Pendapatan (Pengertian, Penyebab Dan Pengukuran),” 2020, <https://www.kajianpustaka.com/2020/04/ketimpanganpendapatan-pengertian-penyebab-danpengukuran.html?m=1>. Diakses pada 27 Oktober 2024

²⁹ Nanang Purwanto, *Pengantar Pendidikan*, 1st ed. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 26.

³⁰ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada), 3.

pekerjaan. Pengangguran dapat didefinisikan sebagai kelompok tenaga kerja yang aktif mencari pekerjaan tetapi belum berhasil mendapatkannya. Tingkat pengangguran dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yang menunjukkan persentase angkatan kerja yang tidak bekerja tetapi sedang aktif mencari pekerjaan. TPT dihitung berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Angkatan kerja terdiri dari seluruh penduduk yang berusia 15 tahun ke atas dan siap bekerja, baik yang sedang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan.

- b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran yang digunakan untuk melihat seberapa baik kualitas hidup masyarakat di suatu daerah atau negara. Indeks ini tidak hanya menilai seberapa kaya suatu wilayah, tetapi juga seberapa sehat, berpendidikan, dan sejahtera masyarakat yang tinggal di sana. Dengan kata lain, IPM adalah cara untuk mengukur kemajuan suatu daerah dalam hal kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. IPM memiliki tiga dimensi yang digunakan sebagai dasar perhitungannya, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*long and healthy life*) yang diukur dengan angka harapan hidup. Pengetahuan (*knowledge*) yang dihitung dari angka harapan sekolah dan angka rata-rata lama sekolah. Dan

standar hidup layak (*decent standard of living*) yang dihitung dari PDB/PDRB (keseimbangan kemampuan berbelanja) per kapita.

- c. Ketimpangan distribusi pendapatan adalah keadaan di mana pendapatan atau kekayaan di dalam suatu masyarakat tidak terdistribusi secara merata di antara seluruh anggota masyarakat. Dengan kata lain, ada sebagian kelompok atau individu yang memiliki pendapatan jauh lebih tinggi dibandingkan kelompok lainnya, sehingga terjadi kesenjangan ekonomi. Ketimpangan distribusi pendapatan dalam penelitian ini diukur menggunakan Koefisien Gini (Gini Ratio), yaitu suatu ukuran statistik yang digunakan untuk menggambarkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di suatu wilayah. Gini Ratio dihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan data pengeluaran per kapita penduduk yang diperoleh dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).
- d. Pendidikan adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi, keterampilan, pengetahuan, dan nilai-nilai individu sehingga mereka dapat beradaptasi dan berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Pendidikan tidak hanya mencakup pembelajaran formal di sekolah atau institusi, tetapi juga mencakup pengalaman sehari-hari, interaksi sosial, dan pembelajaran mandiri yang membantu seseorang memahami lingkungan di sekitarnya. Tingkat pendidikan diukur dengan dua indikator utama, yaitu rata-rata lama sekolah (RLS) dan harapan lama sekolah (HLS). RLS

menggambarkan rata-rata jumlah tahun pendidikan formal yang telah dijalani oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas. Indikator ini mencerminkan kualitas pendidikan yang telah dicapai oleh penduduk dewasa di suatu wilayah. Sedangkan HLS menggambarkan jumlah tahun pendidikan yang diharapkan dapat ditempuh oleh anak-anak usia 7 tahun ke atas hingga usia sekolah menengah atas. Pengukuran kedua indikator ini dilakukan dengan menggunakan data yang tersedia dari Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).

- e. Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Dalam ekonomi Islam, kegiatan ekonomi tidak hanya berfokus pada pencapaian keuntungan materi, tetapi juga pada keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan akhirat. Tujuan utamanya adalah mencapai kesejahteraan bersama dan keadilan sosial melalui distribusi kekayaan yang adil serta penggunaan sumber daya yang bertanggung jawab.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dibuat untuk memudahkan pembaca dapat memahami alur dari penelitian yang disajikan sebagai berikut:

1. Bagian Awal Skripsi

Pada bagian awal memuat halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan dosen pembimbing, halaman pengesahan,

halaman motto dan persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, arti lambang dan singkatan dan abstraksi.

2. Bagian Utama Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Secara garis besar pendahuluan berisi mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah, sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab landasan teori ini mencakup tentang teori – teori yang digunakan pada penelitian ini. Teori tersebut meliputi teori pengangguran struktural oleh Lipsey, *human capital theory* oleh Garry Becker dan teori ketimpangan pendapatan oleh Simon Kuznets.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai tentang rancangan penelitian yang berisi pendekatan dan jenis penelitian, populasi sampling dan sampel, sumber data dan variabel penelitian, teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian serta menganalisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini akan menguraikan hasil penelitian yang berisi tentang paparan data dan pengujian hipotesis yang menjelaskan tentang temuan penelitian untuk masing-masing variabel dalam penelitian.

BAB V PEMBAHASAN

Dalam bab ini dijelaskan tentang analisis cara melakukan konfirmasi antara temuan penelitian dengan teori dan penelitian yang ada serta jawaban dari rumusan masalah.

BAB VI PENUTUP

Pada bab ini menguraikan mengenai rangkuman dan menarik kesimpulan dari permasalahan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan. Pada penutup juga berisi mengenai saran-saran yang diberikan oleh peneliti kepada pihak yang terkait dalam penelitian ini.

3. Bagian Akhir Skripsi

Pada bagian akhir dari skripsi ini memuat tentang daftar pustaka dan daftar lampiran.